

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa tidak lagi menjadi bagian dari wilayah tetapi telah mengambil status mandiri, bertindak sebagai aktor bukan sebagai figur atau objek latar belakang (Sulpan, 2014). Kedudukan desa telah menjadi aktor bukan lagi karakter atau objek pendukung dan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari kawasan. (Bastian, 2015:20). Perihal melaksanakan otonomi daerahnya sendiri desa memerlukan pembiayaan keuangan. Pembiayaan keuangan merupakan faktor penting dalam mendorong penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana pada penyelenggaraan otonomi daerah (Wasistiono, 2006:107).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa mendapat tambahan dana yang diatur dalam Pasal 72. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau disebut Dana Desa guna meningkatkan posisinya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 pasal 19, Dana Desa sendiri digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas diberikan kepada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dengan menggunakan dana desa. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, kualitas hidup manusia, dan pengentasan kemiskinan, ketentuan ini diprioritaskan dalam pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Pusat memberikan anggaran yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah,

bahkan meningkat setiap tahunnya. Alokasi Dana Desa yang disalurkan pada tahun 2015 sebesar 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa menerima Rp. 280 juta. Dana Desa sebesar Rp 72 triliun pada tahun 2020, dengan rata-rata dana desa Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima Rp960 juta.

**Table 1**  
**Perkembangan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 - 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Alokasi (Dalam Triliun Rupiah)</b>	<b>Rata Rata Per Desa (Dalam Juta Rupiah)</b>
2015	20,7	280
2016	46,98	628
2017	60	800
2018	60	800,4
2019	70	933,9
2020	72	960,6

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Pemerintah pusat berharap agar desa dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan Dana Desa sehingga desa dapat lebih maju dan dapat mengelolan infrastruktur yang lebih baik dan benar.

Pengelolaan Dana Desa sendiri dimulai dengan tahap perencanaan dimana pemerintahan desa diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam periode 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. Dalam menyusun RPJMDes, pemerintah desa juga wajib menyelenggarakan Musyawarah.

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Hal tersebut karena partisipasi masyarakat merupakan komponen penting yang diperlukan dalam membuat keputusan di setiap program pembangunan, mengidentifikasi masalah serta potensi yang ada di masyarakat. Apabila desa tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat dan desa tidak memiliki sumber daya aparatur desa yang kompeten untuk melaksanakannya, maka hal tersebut dapat berdampak pada keberjalanan program prioritas yang tidak sesuai dan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Setelah tahap perencanaan yaitu tahap pelaksanaan. Aparatur pemerintah desa berperan penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sebab, mereka dituntut untuk berperan sebagai ketua pelaksana (Kepala Desa) dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah desa lainnya sebagai anggota pelaksana. Kelancaran pembangunan di suatu desa tergantung pada adanya tim pelaksana yang dapat mengkoordinasikan proses pelaksanaan pembangunan. Desa harus menginformasikan kepada

masyarakat secara transparan tentang perkembangan yang telah dilakukan selama tahap pelaksanaan. Misalnya, desa dapat memasang pengumuman melalui baleho yang telah disediakan, yang berisi jadwal kegiatan fisik yang sedang dilakukan. Penyaluran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk pembangunan fisik desa yang meliputi penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan pemberdayaan masyarakat terkait langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Setelah tahap perencanaan selesai baru ke tahap pelaporan, Proses pelaporan digunakan untuk mempelajari tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengelola Alokasi Dana Desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Pelaporan juga dilakukan sebagai salah satu cara agar pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Selain itu, pelaporan digunakan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan desa telah efektif, efisien, dan ekonomis serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku

Terakhir yaitu tahapan pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dibarengi dengan Pertanggungjawaban APBDes. Kepala desa bertanggung jawab untuk memimpin Tim Pengelola Kegiatan dalam hal pertanggungjawaban Dana Desa. Tanggung jawab ini mencakup semua tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan pemantauan. Setiap tindakan yang

dilakukan untuk mengelola Dana Desa dilacak dengan cermat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Penyelewengan yang ada terjadi pada tahap perencanaan seringkali berupa kurangnya keterlibatan masyarakat didalamnya. Hal ini sangat berpengaruh kepada musrenbangdes dimana masyarakat merupakan faktor yang penting karena berkaitan dengan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) desa tahun yang akan dianggarkan dan direncanakan. Masyarakat disini tidak hanya objek saja melainkan juga sebagai subjek dalam pembangunan. Akan tetapi dalam jumlah partisipasinya ketika dilaksanakan Musrenbangdes kurang karena dihadiri oleh sebagian masyarakat saja. Polemik ini sering menjadi masalah umum di Indonesia.

Menurut *Ketua PD Aisyiyah Sumedang Hj. Isni S.sos mengatakan, berdasar hasil Survey yang telah dilakukan bersama simpul belajar INSUN Madani, ditemukan bahwa salah satu akar penyebab dalam transparansi dana desa di Kabupaten Sumedang adalah kurangnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pengelolaan dana desa (pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan (monev).*

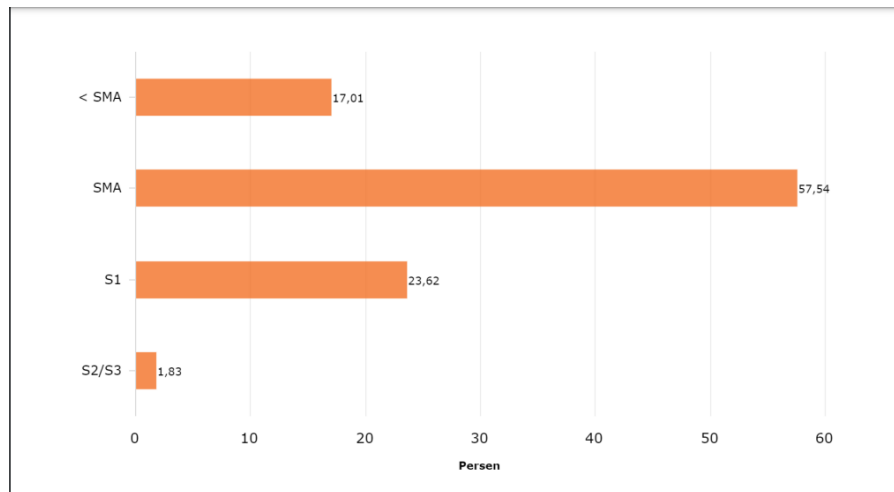
*(<https://www.korsum.id/kurangnya-transparansi-dan-keterlibatan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengelolaan-dana-desa/> 3 Agustus 2021).* Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ramainim Saragih dan Sarwititi Agung (2017) yang menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan penggunaan anggaran dana desa, masyarakat masih

belum bisa memanfaatkannya secara maksimal karena masih ada kendala yang menghadang. Menurut analisis mendalam terhadap data primer, terdapat berbagai jenis hambatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa, antara lain: 1. Secara psikologis masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa dalam artian secara langsung keterlibatan berpikir. 2. Masyarakat tidak berpartisipasi secara fisik dalam pelaksanaan program pengelolaan anggaran dana desa maupun secara langsung dalam penggunaan anggaran dana desa. 3. Baik dari segi ide maupun usaha, masyarakat tidak terlibat langsung dalam penggunaan uang APBDes. 4. Pemanfaatan uang APBDes dalam bentuk keahlian tidak langsung melibatkan masyarakat. Anggaran desa tidak secara langsung digunakan oleh masyarakat untuk membiayai pengeluaran waktu.

Selain itu dalam tahap pelaksanaan, seharusnya pemerintah desa secara transparan menginformasikan kepada publik setiap kemajuan yang telah terjadi dengan memposting pemberitahuan seperti baleho dan bentuk komunikasi lainnya, akan tetapi dalam kenyataannya masih belum terpasang di depan balai desa atau setiap tempat. Selain itu, terkait penyampaian informasi melalui media online belum dapat dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini karena sumber daya manusia dalam bidang teknologi yang rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Hendi Sandi Putra (2017) yang menyatakan bahwa rendahnya SDM perangkat desa menyebabkan kinerja perangkat desa tidak maksimal.

**Tabel 2**

**Tingkat Pendidikan Perangkat Desa di Indonesia**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)2021

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa diaharuskan untuk melaporkan pada sistem sikedes yang merupakan aplikasi sistem keuangan desa. Namun, berdasarkan temuan Afrizal et al. (2016), yang mengatakan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes dalam mengelola keuangan desa dapat menimbulkan masalah karena sumber daya manusia yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung hal ini. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Siswandi et al. (2019), yang mengungkapkan adanya hubungan substansial antara efektivitas pegawai di Kecamatan Duren Jaya Bekasi dengan pelatihan komputer.

Masih terdapat kasus penyalahgunaan Dana Desa, seperti kasus mantan Kepala Desa Adat Samuan, Desa Carangsari, Kabupaten Badung, I Made Darma yang menggunakan dana desa untuk membeli narkoba. (Bali Tribune. 13 Oktober 2015). Hal ini didukung oleh hasil peneliti Putu Rizky

Sitraputra (2019). Yang menyatakan bahwa kasus Ni Made Ratnadi, mantan kepala satra desa, pernah menyelewengkan dana sebesar Rp 1.430.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) melalui aksi tersebut. Pemerintah desa yang tidak jelas dan tidak akuntabel, masyarakat yang kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menangani uang tersebut, dan masalah lainnya semuanya dapat berkontribusi pada penyalahgunaan pendapatan desa. Oleh karena itu, beberapa hal harus dilakukan, antara lain penyempurnaan atau optimalisasi struktur pemerintahan desa, memastikan pemerintahan desa akuntabel dan transparan, serta menjaga kontrol anggaran, agar penggunaan keuangan desa tetap berjalan dengan baik sesuai target.

Kemampuan desa dalam mengelola internal Dana Desanya sendiri seringkali masih di pertanyakan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) Pengelolaan Keuangan desa dinilai masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang desa dan regulasi pendukung yang relatif baru serta tumpang tindih dengan regulasi lain sehingga belum sepenuhnya dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu juga desa masih banyak keterbatasan keterbatasan yang dapat mempengaruhi pengelolaan Dana Desanya itu sendiri. Keterbatasan pemerintahan desa pada umumnya disebutkan oleh Wasistiono dan Tahir (2006:96) yaitu : (1) Kualitas sumber daya aparatur desa pada umumnya masih rendah (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 72



tahun 2005 tentang Desa (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sehingga dapat berdampak pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan dan (4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah yang sangat terbatas sehingga mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan serta berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Adanya proses beberapa tahapan dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa seringkali tidak transparan dalam pelaporan dan tidak taat dalam memberikan kejelasan laporan, Maka dari itu dalam proses pengelolaan Dana Desa perlu adanya monitoring.

Monitoring sendiri ialah suatu kegiatan dimana kita memantau secara dekat suatu proses atau serangkaian keadaan dengan maksud agar semua informasi dan data yang diperoleh dari temuan investigasi atau pertimbangan ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tambahan. Tindakan ini akan diambil jika dari hasil pengamatan mengungkapkan bahwa ada unsur- unsur yang tidak sesuai dengan rencana awal kegiatan. Agar suatu kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien serta memberikan umpan balik kepada pengelola suatu kegiatan setiap tahunnya maka dilakukan monitoring. Umpan balik ini dimaksudkan untuk memberdayakan pemimpin kegiatan untuk meningkatkan rencana operasional suatu kegiatan dan segera menanggapi untuk mengatasi masalah

dan hambatan yang muncul.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, monitoring diartikan sebagai kegiatan mengamati secara cermat suatu keadaan atau keadaan, termasuk tingkah laku atau kegiatan tertentu, dengan maksud agar semua masukan data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang terjadi selanjutnya diperlukan. Jika pengamatan mengungkapkan elemen atau keadaan yang bertentangan dengan rencana awal, maka tindakan ini diperlukan. Tujuan monitoring termasuk mengamati atau mempelajari tentang perubahan dan kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan mengantisipasi serta menangani masalah tersebut.

Beberapa profesional manajemen berpendapat bahwa pemantauan memiliki tujuan yang sama dan sama pentingnya dengan monitoring. Menurut Conor (1974), keberhasilan tujuan sebagian ditentukan oleh rencana yang direncanakan dan sebagian oleh pengawasan atau monitoring. Perencanaan dan pemantauan (monitoring) adalah dua tugas yang biasanya disorot oleh manajemen sebagai hal yang sangat penting. Menurut William N Dunn dalam *Public Policy Analysis: An Introduction* menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

Tujuan dari monitoring adalah untuk mengawasi atau mempelajari tentang perubahan dan kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan upaya untuk mengantisipasi dan menyelesaikannya. Disamping itu, monitoring dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa. Disisi lain juga monitoring sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa khususnya untuk sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi menuju perbaikan kinerja yang lebih bagus kedepannya. Desa harus melakukan monitoring karena Jika monitoring dilakukan dengan benar, dapat membantu memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai rencana (sesuai dengan kriteria program). Selain itu, apabila dilakukan dengan benar monitoring akan memberikan informasi manajer program atau pengelola program jika ada tantangan dan penyimpangan, serta bantuan dalam melakukan evaluasi.

Desa Kesesirejo merupakan desa yang berada di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang adalah salah satu desa yang terletak di Jawa Tengah. Desa Kesesirejo yang terletak di Kecamatan Bodeh ini mempunyai luas wilayah 361,329 km<sup>2</sup> dengan 7592 jiwa ini, yang secara administratif mendapat Dana Desa dari anggaran pendapatan belanja negara dari pemerintah pusat. Secara umum, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan merupakan tujuan dana desa.

Sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2021, yang menjabarkan tata cara pengalokasian dan penetapan Dana Desa setiap desa di Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2022, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai sektor pembangunan dan sektor pemberdayaan masyarakat. Prioritas tersebut meliputi pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar, pelayanan sosial, penanganan dampak pandemi Covid-19, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang memperoleh Dana Desa yang meningkat dapat dilihat tabel sebagai berikut:

**Tabel 2****Rincian Dana Desa yang diterima Desa di Kecamatan Bodeh Tahun 2021-2022**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Pagu Dana Desa Per-Desa 2021 (Rp)</b>	<b>Pagu Dana Desa per-Desa 2022 (Rp)</b>	<b>Kualifikasi Desa Idm</b>
1	Longkeyang	1.750.490.000	1.238.384.000	Berkembang
2	Jatingarang	2.280.748.000	1.933.868.000	Maju
3	Gunungbatu	1.629.661.000	1.037.079.000	Berkembang
4	Pasir	1.689.267.000	1.490.458.000	Maju
5	Kwasen	1.548.221.000	1.036.572.000	Berkembang
6	Jatroyom	2.325.816.000	1.408.218.000	Maju
7	Parunggalih	1.391.260.000	919.288.000	Berkembang
8	Payung	1.511.534.000	1.021.512.000	Berkembang
9	Cangak	1.704.394.000	1.568.739.000	Berkembang
10	Kebandungan	1.112.856.000	1.231.341.000	Berkembang
11	Kesesirejo	2.159.927.000	2.412.225.000	Berkembang
12	Babakan	1.156.952.000	1.003.052.000	Maju
13	Karangbrai	1.712.100.000	1.373.320.000	Berkembang
14	Jraganan	1.171.839.000	957.565.000	Berkembang
15	Kebandaran	1.294.400.000	923.495.000	Berkembang
16	Bodeh	1.029.571.000	1.080.960.000	Berkembang
17	Muncang	1.502.072.000	1.169.815.000	Maju
18	Kelangdepok	1.142.356.000	1.073.458.000	Maju
19	Pendowo	1.260.213.000	1.379.476.000	Berkembang

Sumber: Laporan Besaran Dana Desa Se-Kecamatan Bodeh Tahun 2021-2022.

Banyaknya anggaran Dana Desa yang diterima pemerintah Desa Kesesirejo maka, Desa Kesesirejo harus melakukan monitoring, apalagi dengan banyaknya dana yang diglontarkan pemerintah dan Dana Desa yang setiap tahunnya bertambah, Desa Kesesirejo masih berada di tingkat desa berkembang, jauh berada di bawah desa muncang kelangdepok, jatingarang, pasir, dan jatiroyom. Di tambah lagi selama beberapa tahun terakhir Desa Kesesirejo mendapatkan Dana Desa terbesar Sekecamatan Bodeh.

Berdasarkan wawancara bersama sekretaris Desa Kesesirejo bahwa terkadang dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa masih mengalami keterlambatan dan Siskeudes yang merupakan aplikasi sistem keuangan desa beberapa kali bermasalah sehingga data realisasi yang diinput hanya bisa diterima ketika sesuai dengan rencana awal. Selain itu, sosialisasi atas aplikasi tersebut juga dirasa kurang sehingga berdampak pada kesiapan sumber daya manusia dalam menggunakan Siskeudes.

Maka dari itu Desa Kesesirejo perlu adanya monitoring pengelolaan Dana Desanya dimana perlu ditelaah lebih detail, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program program pemerintah desa yang masih berjalan. Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk menentukan sejauh mana kewenangan desa mengawasi pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih detail, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program program pemerintah desa yang masih berjalan. Oleh dari itu penelitian ini mengangkat

judul penelitian skripsi “Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo  
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, teridentifikasi beberapa pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu:

1. Pengelolaan Dana Desa yang masih rendah, Hal ini karena kemampuan desa dalam mengelola internal Dana Desanya sendiri seringkali masih di pertanyakan.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat di dalam menangani rencana pembangunan desa
3. Ketidaktepataan sasaran dalam Dana Desa, seperti terjadi korupsi Dana Desa oleh kepala desa atau bahkan aparaturnya.
4. Sumber daya manusia yang masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pengelolaan Dana Desa.
5. Media informasi desa yang kurang baik. terkait penyampaian informasi melalui media online maupun media offline seperti pemasangan baliho dan lain sebagainya.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana monitoring pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan monitoring pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang?



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diambil pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis monitoring dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
2. Untuk menganalisis kendala dihadapi oleh para pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

- **Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa Kesesirejo. Dalam membantu mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan prinsip Monitoring dalam rangka memajukan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi tata kelola yang baik di lembaga pemerintah desa khususnya pada pemerintahan desa

- **Manfaat Praktis**

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan prinsip Monitoring.

**1.6 Kerangka Teori**  
**1.6.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1	Dewi Citra Larasati dan Muhammad Okto Adhitama (2018)	Monitoring dan Evaluasi Progam Dana Desa (DD) Sesuai Dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur)	Kajian ini bermaksud mengkajiproses monitoring dan Evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap program Dana Desa (DD).)	Memanfaatkan pendekatan kualitatif, investigasi ini. Pengambilan data melalui wawancara yang berpedoman pada pedoman wawancara yang positif (mendukung). mengidentifikasi informan melalui purposeful sampling. Metodologi bertingkat untuk analisis data digunakan,dan Reliabilitas data Diperiksa dengan tringal	Temuan studi menunjukkan bahwa baik program fisik maupun non fisik, serta monitoring dan evaluasi dilakukan di bawah pengawasan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, laporan setelah pelaksanaan program, dan laporan tahunan. Melalui BPD, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan. Ketersediaan dan tampilan (keterbukaan) berkas DD, kejelasan berkas DD, aturan yang digunakan untuk mengelola DD, pertanggungjawaban

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
				dan peer debriefing	laporan, dan kemampuan melihat dampak merupakan indikator mekanisme monitoring dan evaluasi.)
2	Romain Saragih dan Sarwititi Agung (2017)	Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Panggilan Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa)	Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri dari desa ke atas. Jika menggunakan uang desa sebenarnya dapat memberdayakan	Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan, dan pendekatan untuk dokumentasi mencakup laporan tahunan, setengah tahunan, dan bulanan	Berdasarkan temuan kajian, RPJM-RKP Desa yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menyebabkan beberapa indikasi masih adanya ketidakpastian program penggunaan dan pengutamaan penggunaan dana desa. Posisi pendamping dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan tidak ideal karena status

			masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat desa secara partisipatif hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor yang menjadi perhatian.		ketidaktahuan perangkat desa. Akibatnya, pembangunan tidak selalu mengoptimalkan kesejahteraan penduduk pedesaan.
No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
3	Afrizal, Mazaliza, Z., dan Khudri, A. (2016)	Analisis Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Pinang Melalui Aplikasi Siskeudes	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penerapan SISKEUDES sistem keuangan desa dalam meningkatkan standar	Pendekatan atau metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini.	Berdasarkan temuan penelitian, Desa Sungai Pinang mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES secara penuh, memunculkan akuntabilitas keuangan desa yang berkualitas, tercapainya

			akuntabilitas keuangan desa		tata kelola keuangan desa yang sehat sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan memastikan laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi SISKEUDES jujur. SISKEUDES menghasilkan pelaporan keuangan yang terpercaya
--	--	--	--------------------------------	--	---

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
4	Hendi Sandi Putra (2017)	Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kecamatan Gampangrejo Kalibelo Kabupaten Kediri	untuk memastikan elemen-elemen apa saja yang mempengaruhi kemampuan Desa Kalibelo untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan untuk mengidentifikasi tantangan apa saja yang mungkin muncul dalam melakukannya di Desa Kalibelo, Kecamatan	Sebagai bagian dari teknik penelitian kualitatif, informan kunci dari lingkungan pemerintahan desa diwawancarai secara mendalam dan dilakukan studi literatur untuk mengumpulkan data.	Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikatakan bahwa tata kelola perlu ditingkatkan lebih lanjut di beberapa bidang: Akuntabilitas tindakan perangkat desa; transparansi dalam penggunaan dana lokal dan berbagi informasi.

			Gampengrejo, Kabupaten Kediri.		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
5	Edwien Kambey 2017	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dana Desa dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara	Pendekatan atau metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini.	Temuan studi menunjukkan bahwa jalan rabat beton Desa Karegesan tidak dibangun dengan efisiensi terbaik karena penggunaan tenaga kerja yang tidak efektif. Oleh karena itu sebaiknya dibuat rencana kerja untuk setiap proyek agar masyarakat setempat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan



					dan tidak mengabaikan kegiatan yang sedang berlangsung.
--	--	--	--	--	---

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
6	Lubherty Dewi Amalia, dkk. 2019	Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung Tahun 2015- 2018	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan pelaksanaan anggaran dana desa di Desa Greges Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung antara tahun 2015	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi deskriptif kuantitatif.	Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap kuesioner yang dikirimkan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, dan Kabupaten Temanggung telah berhasil dilaksanakan. Kemudian pada tahun 2015 sampai dengan

			sampai dengan tahun 2018		tahun 2018 terdapat variabel tingkat efektivitas pencapaian kinerja keuangan penerapan Dana Desa pada program pembangunan dan program pemberdayaan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dari aparatur pemerintah dan masyarakat, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa menjadi faktor yang membuat Dana Desa kurang efektif.
--	--	--	--------------------------	--	---

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
7	Hyronimus & Lambertus Langga 2021.	The Effectiveness of Village Fund Cash Block Grants (BLT) for the Poor Society Affected by the Covid-19 in Nangapanda District Ende Regency	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan program hibah langsung desa	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi deskriptif kuantitatif	Dampak COVID-19 Terhadap Masyarakat Miskin dan Efektivitas Dana Desa Di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende
8	Johnny H. Posumah, dkk. 2018.	Effectiveness Fund Village Improvement In The Sea In The Village Development District Pineleng Minahasa	n Pineleng Village, Laut Minahasa District, this study seeks to identify the issues with the process and application of increasing development money through communities	Metodologi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini adalah masih kurangnya kerjasama antara pemerintah dan peningkatan pembangunan masyarakat. Dalam meningkatkan pembangunan meningkatkan pembangunan di sana melalui Dana Desa atau bantuan dari pemerintah pusat kepada Desa

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
9	Akhmad & Lukman Hakim 2018.	Effectiveness of Village Fund Management: A Case Study in Bone District, South Sulawesi	Bermaksud mengevaluasi efisiensi penanganan dana desa di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan	Metodologi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana masyarakat secara efektif dan efisien dapat meningkatkan potensi ekonomi desa. Kurangnya personel perencanaan dan pengelolaan keuangan desa merupakan persoalan terbesar yang muncul dalam pengelolaan dana desa

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
10	Siswandi, S., Narpati, B., dan Gofur, A. (2019)	Making Work Effectiveness In Kelurahan Duren Jaya Bekasi Jawa Barat.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan untuk meningkatkan efisiensi kerja komputer dan arsip di Duren Jaya Urban Bekasi	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan proporsional random sampling sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) yang meliputi seluruh pegawai Kelurahan Duren Jaya Bekasi	Berdasarkan temuan penelitian, (1) ada hubungan positif yang signifikan antara pelatihan kearsipan dengan kinerja pegawai di Kelurahan Duren Jaya Bekasi, dan (2) ada hubungan positif yang signifikan antara pelatihan komputer dengan kinerja pegawai di Kelurahan Duren Jaya Bekasi.

Berdasarkan sumber penelitian terdahulu yang telah diolah oleh penulis dari 5 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Lima penelitian terdahulu nasional menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Riset terkait dengan tema monitoring pengelolaan Dana Desa masih jarang yang ditemukan dalam berbagai artikel, dan banyaknya artikel tentang evaluasi pengelolaan Dana Desa, maka peneliti sangat berminat pada kajian tentang monitoring, maka peneliti mengambil substansi judul yang berkaitan dengan monitoring yaitu, Monitoring Pengelolaan Dana Desa.

Penulis kesulitan untuk mencari penelitian terdahulu internasional yang memiliki fokus yang sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dikarenakan kesulitan mencari penelitian terdahulu internasional dengan fokus yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. maka peneliti mencari penelitian dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti akan lakukan. Lima jurnal internasional yang peneliti gunakan memiliki tema yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Desa, Efektifitas Penggunaan Dana Desa. Jurnal internasional yang peneliti gunakan sebagian besar menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa pendekatan yang berbeda-beda.

Penelitian yang penulis akan lakukan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu nasional yang penulis gunakan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah memiliki fokus yang berbeda yaitu berkaitan dengan Monitoring Pengelolaan Dana Desa. Selain itu persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu nasional adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian penulis dengan semua penelitian terdahulu sebelumnya adalah penulis melakukan pendalaman atau melakukan analisis Monitoring Pengelolaan

Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Selain itu, juga menganalisis Indikator indikator yang mempengaruhi Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

### **1.6.2 Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano (1998: 29-30), administrasi publik adalah suatu proses di mana sumber daya publik dan karyawan disusun dan dikoordinasikan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola pilihan dalam kebijakan publik. Penulis lebih lanjut menjelaskan bahwa administrasi publik adalah ilmu dan seni perencanaan dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh administrasi publik, yang mencoba untuk memperbaiki praktik yang ada, khususnya di bidang sumber daya manusia, manajemen organisasi, dan keuangan.

Mengutip pernyataan Trecker dalam Donovan dan Jackson (1991:10). bahwa administrasi adalah kegiatan yang dinamis dan berkelanjutan yang berusaha memanfaatkan orang-orang sebagai suatu kelompok melalui koordinasi dan kerjasama. Mereka mengklaim bahwa definisi ini sudah mencakup kegiatan organisasi. Menemukan kebutuhan, mengklarifikasi dan memanfaatkan tujuan organisasi sebagai permintaan program dan layanan, serta memperoleh sumber daya keuangan, fasilitas, karyawan, dan berbagai bentuk bantuan lainnya, semuanya merupakan kegiatan administratif..

### **1.6.3 Paradigma Administrasi Publik**

Nicolas Henry (1988:33-54), berpendapat bahwa ada 5 paradigma yang terdapat didalam administrasi public yakni, **Paradigma pertama**, Prinsip-prinsip Administrasi negara (1927-1937), secara administrasi yang ada didalam negara fokusnya tidak terdapat masalah dan peringatannya mengenai:”prinsip-prinsip administrasi” dengan pandangan pemberlakuan secara universal dalam lingkup sosial maupun organisasi di dalam suatu budaya. Pada masa ini (1927-1937), administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya yakni sebuah penerapa di negara maupun budaya yang berbeda baik didalam

visi maupun lingkungannya. **Paradigma kedua**, Paradigma dikotomi antara Politik dan Administrasi (1900- 1926), didalam focus ini terdapat maslaah yang ada di dalam tersusunnya sebuah anggaran, pemerintahan, birokrasi, kepegawaian serta organissi didalamnya dan permaslaahn didalam pemerintahan yakni kebijakan serta politik yakni sebuah substransi secara politik. Lokus nya dimana permaslaahan administrasi tersebut ada. **Paradigma ketiga**, Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970). Pada masa ini (1950-1970), dalam penjelasan mengenai fase ketiga yakni udah penetapan secara Kembali dari hubungan yang ada di dalam politik maupun administrasi secara negara Umar (2004:5), berpendapat bahwasanya terdapat penggolongan fase dimana pencatatan diperlukan didalamnya yakni adanya penggunaan pertumbuhan studi yang ada di dalam sebuah kasus yang memiliki sifat secara epistemology lalu adnya studi pembangunan serta perbandingan didalam sebuah administrasi dengan pembagian ilmu secara administrasi. **Paradigma keempat**, Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970). Pada masa ini (1954-1970), perkembangan administrasi suatu negara dengan adanya ketidaksengajaan atau ketidakseimbangan terdapat didalamnya dan hal tersebut dianggap sebagai ilmu yang ada di dalam ilmu politik maupun administrasi. **Paradigma kelima**, Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara. Masa ini terjadi setelah tahun 1970. Terdapat sebuah perkembangan mengenai teori yang ada di dalam sebuah organisasi yang dikaitkan dan disangkutpautkan dengan ilmu yang ada di dlam negara meliputi berbagai kebijakan dan juga aturan aturan yang ada didalamnya dan hal ini akan menghasilkan warna yang baru yang terdapat didalam bidang kajian yang ditunjuk dengan waktu yang singkat. **Paradigma keenam**, Administrasi Negara Baru yang meliputi usaha pengorganisasian, menggambarkan, mendesain dan membuat organisasi sehingga berjalan ke arah yang lebih maju dengan mengedepankan nilai nilai sosial kemanusiaan yang maksimal serta



menggunakan sistem desentralisasi dan organisasi yang demokratis responsif serta berdampak secara merata di masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma yang keenam dimana Monitoring Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang, mendesain organisasi ke arah yang lebih maju. Monitoring juga salah satu aspek manajemen pelayanan publik yang sesuai dengan Paradigma Administrasi Negara Baru yang menggunakan sistem desentralisasi yang demokratis serta responsif dan berdampak merata dimasyarakat.

#### **1.6.4 Manajemen Publik**

Menurut Mary Parker Follett (2007), manajemen adalah suatu proses karena memerlukan pelaksanaan tugas termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan operasi. Usaha saling terintegrasi yang akan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga manajemen disebut sebagai sistem.

James F. Stoner (2004) mendefinisikan manajemen sebagai proses mengkoordinasikan dan memanfaatkan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, manajemen mengintegrasikan dan mengkoordinasikan operasi sehingga dapat diselesaikan dengan sukses dan efektif oleh orang lain. George R. Terry mengemukakan ada empat tahap dalam manajemen yaitu:

##### *1. Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses memilih fakta, menghubungkan fakta, dan menciptakan serta menerapkan estimasi atau asumsi masa depan dengan menguraikan dan menyusun tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

## 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Proses pengorganisasian meliputi mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyusun berbagai tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menugaskan orang (karyawan) untuk tugas tersebut, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk persyaratan kerja, dan menampilkan wewenang yang telah didelegasikan kepada setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap tugas yang diantisipasi.

## 3. *Actuating* (Penggerakan)

Menurut definisi yang diberikan di atas, tingkat aktivitas setiap anggota kelompok manajemen—dari atas ke bawah— menentukan tercapai atau tidaknya tujuan. Karena tindakan yang tidak tepat sasaran hanyalah pemborosan sumber daya (orang, uang, waktu, dan materi), tindakan tersebut juga merupakan pemborosan alat manajemen. Oleh karena itu, semua kegiatan harus berorientasi pada tujuan.

## 4. *Controlling* (Pengawasan)

Proses memutuskan apa yang harus dilakukan, atau pengukuran, apa yang sedang dilakukan, atau implementasi, meninjau implementasi, dan, jika diperlukan, melakukan modifikasi agar implementasi dilakukan sesuai rencana, atau sesuai ukuran, adalah yang dimaksud dengan sebagai pengawasan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keempat tahap manajemen dimana Monitoring Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang, mendesain proses mengkoordinasikan dan memanfaatkan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Monitoring juga salah satu aspek manajemen pelayanan publik yang sesuai dengan keempat tahapan diatas.

### **1.6.5 Monitoring**

Menurut Moerdiyanto (2009), Monitoring adalah tugas yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengawasi bagaimana perusahaan dikelola selama menjalankan usahanya, mengevaluasi keberhasilan tujuan, dan mengidentifikasi unsur-unsur yang membantu dan menghambat pelaksanaan program. Data dikumpulkan dan dianalisis selama pemantauan, dan kesimpulan dari analisis ditafsirkan sebagai pedoman bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan.

Untuk memastikan bahwa semua tujuan organisasi dan manajemen tercapai, pemantauan adalah kegiatan yang diperlukan (Handoko, 1995). Definisi lain dari monitoring adalah proses menentukan apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi isu-isu yang muncul agar dapat segera diselesaikan, menentukan apakah kebiasaan kerja dan gaya manajemen yang digunakan sudah sesuai untuk memenuhi tujuan, dan menentukan hubungan antara kegiatan dan tujuan. untuk menentukan ukuran kemajuan (Sutabri, 2012).

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis data kegiatan dan program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan untuk lebih meningkatkan kegiatan atau program tersebut. Pemantauan tingkat tinggi dilakukan agar dapat melakukan pengukuran dari waktu ke waktu yang menunjukkan pergerakan menuju atau menjauh dari suatu tujuan. Pemantauan didefinisikan sebagai menyadari apa yang ingin diketahui. Pemantauan biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa proses dan objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan pengelolaan untuk hasil

tindakan dari berbagai jenis, termasuk tindakan untuk mempertahankan pengelolaan yang sedang berlangsung. Pemantauan akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu. Menurut Nanang Fattah (1996), prinsip monitoring dibedakan menjadi 3 tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan:

Identifikasi hal-hal yang akan dipantau, variabel-variabel yang akan dipantau, dan penggunaan indikator yang sesuai dengan tujuan program merupakan persiapan. Pada awalnya diperlukan untuk menetapkan batasan dan spesifikasi variabel yang sedang direncanakan. William N. Dunn (2000).

2. Tahap Pelaksanaan:

Dengan menggunakan standar (variabel) yang dibuat pada tahap perencanaan, pemantauan ini digunakan untuk menilai ketepatan dan tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek yang sedang dilakukan. Ini dilakukan setelah memastikan bahwa variabel yang dipantau dan indikatornya telah ditetapkan dengan benar.

3. Tahap Pelaporan

Langkah ketiga, yang melibatkan penilaian apakah kinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, juga mencakup tahap evaluasi, yang membandingkan tindakan yang telah diselesaikan dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah itu, hasilnya ditindaklanjuti dan dibuat laporan.

### **1.6.5.1 Indikator Monitoring**

Menurut Dunn (1981), Monitoring mempunyai empat Indikator, yaitu:

1. Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah perilaku administrasi, staf, dan semua orang yang terlibat mematuhi peraturan dan regulasi. Adapun indikator dalam ketaatan sendiri meliputi:

- a) Ketaatan Peraturan

Setyawan dkk. dalam Pertiwi & Utami, (2020) menegaskan bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat dipenuhi karena mengikuti hukum dan peraturan membantu program berjalan dengan lancar.

- b) Ketaatan Pedoman Layanan

Pedoman layanan sendiri ialah sesuatu yang digunakan oleh unit layanan sebagai pedoman di eksekusi yang memuat dari SOP, SPP, Maklumat. layanan adalah tindakan atau urutan tindakan yang tidak terlihat (tidak dapat disentuh) dan berlangsung akibat adanya pertukaran antara pelanggan dan staf (VWT Kawung, JH Posumah, dll. 2017).

2. Pemeriksaan (auditing). Monitoring memastikan apakah sumber daya dan layanan yang ditujukan untuk individu atau kelompok (target) tertentu telah disampaikan kepada mereka. Adapun indikator dalam pemeriksaan meliputi:

- a) Ketersediaan sumber daya

Sistem monitoring dibuat sederhana; disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Hal ini untuk menghindari kesulitan implementasi di lapangan (Wardiningdyah, 2016), oleh karena itu perlu diidentifikasi ketersediaan sumberdaya yang dimiliki organisasi tersebut

b) Keakuratan temuan Auditing pada Monitoring

Menurut Peraturan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007, kualitas audit ditentukan berdasarkan Kualitas Proses (akurasi temuan audit, skeptisisme). Keberhasilan penyelesaian yang diupayakan entitas yang diaudit menentukan sejauh mana manfaat yang diperoleh dari pekerjaan audit, bukan temuan audit yang diungkapkan atau rekomendasi yang dibuat. Selain itu, audit harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai dengan protokol, dan dengan rasa skeptis yang berkelanjutan (Efendy, 2010).

3. Laporan (accounting). Setelah waktu yang telah ditentukan, monitoring menghasilkan data yang digunakan untuk “menghitung” dampak perubahan sosial dan pembangunan masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan. Laporan dikatakan berhasil apabila sudah memenuhi indikator:

a) Persiapan laporan

Persiapan laporan ialah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan aspek seperti pemahaman, definisikan masalah, tujuan, ruang lingkup sebelum di buat pelaporan. Di semua bidang, termasuk saat menulis laporan, persiapan sangatlah penting. Tentukan Masalah, Identifikasi Tujuan, dan Tentukan Ruang Lingkup adalah tiga langkah pertama dalam persiapan yang diperlukan sebelum menyusun laporan. (Nini Anindita, 2017).

b) Penyusunan laporan

Kompilasi laporan adalah tugas yang biasanya dilakukan dalam lingkungan profesional. Penyusunan laporan ini merupakan fungsi yang krusial dalam sistem informasi setiap organisasi. Langkah terakhir dari setiap tindakan baik yang rutin maupun yang dilakukan setiap saat adalah menyusun laporan (Royandiah, 2021).(Royandiah, 2021).

c) Pengawasan/ siapa yang mengawasi.

Pengawasan laporan ialah proses untuk menjamin bahwa tujuan dari pelaporan itu sudah tercapai atau sesuai dari target. Setiap pimpinan dari setiap satuan kerja atau unit kerja wajib melakukan tugas pengendalian atau pengawasan dalam manajemen fungsional yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. (Mutiara Adeliyah, 2018).

4. Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan data yang membantu menjelaskan dampak kebijakan dan ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi. Adapun indikator dari penjelasan adalah:

a) Kejelasan informasi hasil monitoring

Pelaksanaan monitoring harus memperhatikan timeline yang jelas supaya hasil monitoring dari waktu ke waktu dapat terkontrol dengan baik (Ramdhan, Sumaryana, & Ismanto, dalam Afila et al., 2022)

b) Langkah penanganan

Langkah penanganan ialah suatu proses mengatasi ketidaksesuaian antara informasi dengan realisasi, dan tindak lanjut dari langkah korektifnya. Ketidaksesuaian



antara rencana dan kondisi nyata di lapangan, dimana target waktu kerja dan target produksi tidak konsisten, dapat terjadi berulang-ulang dan bertahan setiap bulannya, dan jika tidak diketahui lebih awal dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan (Eko Santoso, 2021).

#### **1.6.5.2 Kendala Monitoring**

Kendala monitoring pemerintahan desa pada umumnya disebutkan oleh Wasistiono dan Tahir (2006:96) yaitu:

1. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa. Adapaun indikator dari belum sempurnanya kebijakan ialah
  - a) Adanya ketersediaan suprastruktur hukum Membangun superstruktur pendukung untuk menciptakan suasana yang cocok untuk operasi pemantauan (seperti mendirikan badan khusus, memiliki undang-undang dan peraturan pemerintah yang jelas). Peraturan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Upaya Tim Monitoring dan Evaluasi akan berpedoman pada Pedoman Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah. (Kemenkumham, 2019).

b) Infrastruktur hukum

Adalah organisasi kekuatan politik masyarakat yang secara aktif terlibat dalam politik sebagai aktor informal untuk mempengaruhi kebijakan negara (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 79).

2. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah yang sangat terbatas sehingga mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan serta berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan. Adapun indikator dari sarana dan prasarana penunjang operasional ialah

a) Dibangunnya infrastruktur pembangunan

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan merupakan salah satu contoh bagaimana perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Menurut Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulang (2021). Infrastruktur mengacu pada segala sesuatu yang diperlukan untuk suatu proses yang akan dilaksanakan, apakah itu untuk bisnis, pengembangan, atau tujuan lain. Salah satu

kekuatan utama di balik pembangunan dan kemajuan ekonomi adalah infrastruktur.

b) Hambatan dalam pembangunan

Menurut Umar Nain (2019). Tantangan pelaksanaan pembangunan desa antara lain terlalu meninggikan strategi pembangunan desa di antara kelompok merupakan salah satu tantangan pelaksanaannya, seperti yang terlihat dari patologi pembangunan desa. Keangkuhan sektoral, pola pikir aparatur, perspektif sosiohistoris, regulasi dan implementasi yang tidak konsisten, dan pembangunan desa.

3. Kendala kendala lainnya. Kendala lainnya ialah kendala yang tidak termasuk dari poin diatas yang sifatnya spontan sehingga bisa terjadi sewaktu waktu.

a) Hambatan tidak terduga

Hambatan tidak terduga sendiri ialah hambatan atau rintangan yang sebelumnya tidak di sebutkan dari poin poin diatas, yang sewaktu waktu bisa terjadi kapan saja dalam prosesnya. Hambatan adalah keadaan yang membatasi, menghambat, atau melarang pencapaian tujuan. (Teguh Aji, 2018).

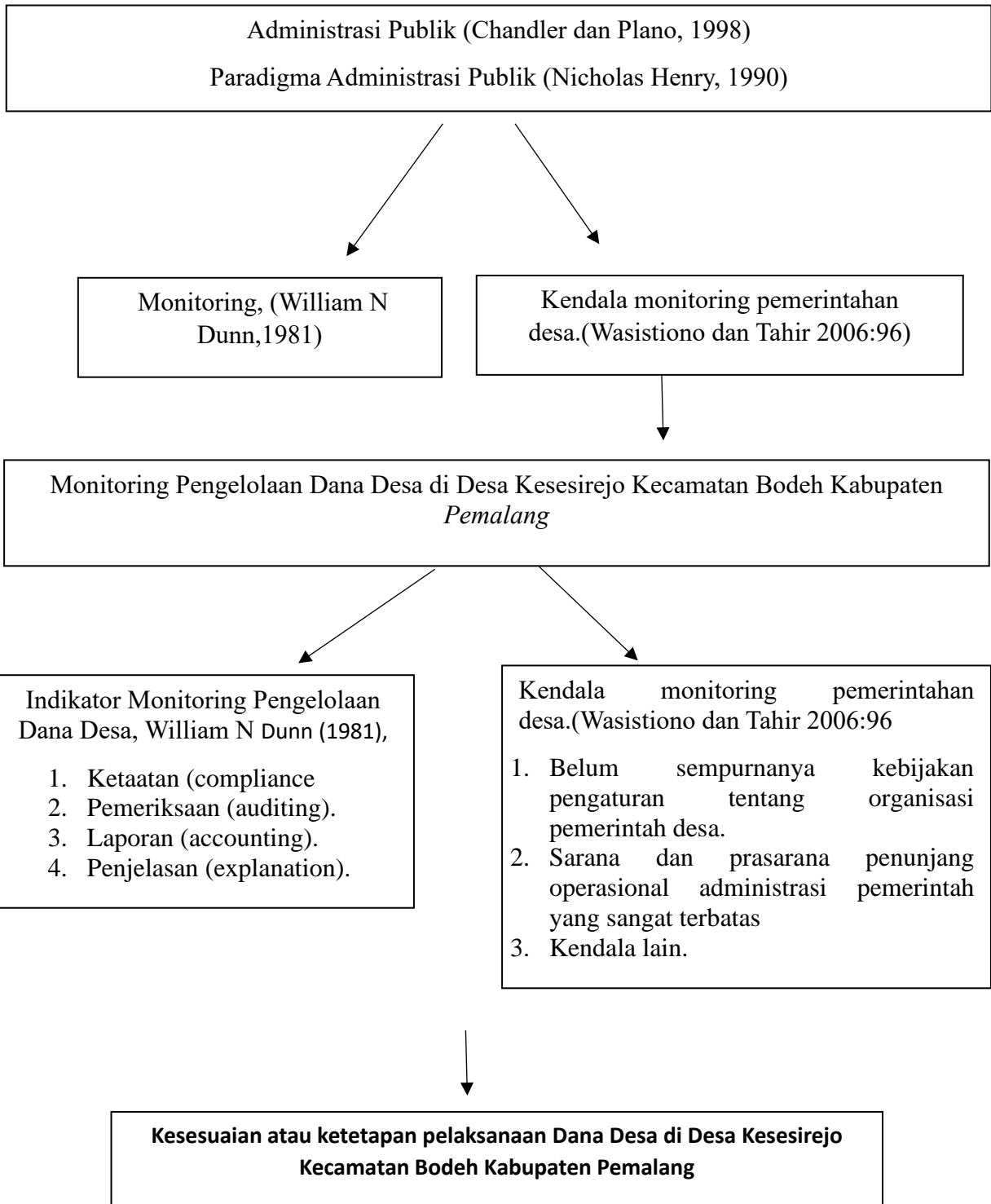
### **1.7 Kerangka Berpikir Teoritis**

Menurut Sugiyono kerangka berpikir adalah ide yang diterapkan sebagai teori yang ada hubungannya dengan beberapa elemen yang telah diakui sebagai kesulitan yang signifikan. Pengaturan di mana kerangka penelitian akan digunakan. Akan lebih baik jika dapat diartikulasikan secara konseptual ketika melakukan penelitian yang membutuhkan pola pikir tertentu. Itu juga dapat menjelaskan bagaimana berbagai faktor berhubungan satu sama lain.

Dalam hal ini Desa Kesesirejo melakukan monitoring pengelolaan Dana Desa agar dana yang tersalurkan dari pemerintah pusat kepada Desa dilakukan secara transparan dan akuntabilitas guna tidak terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa selain itu juga dalam mengelola Dana Desa agar melakukan prinsip prinsip monitoring. Hal ini sesuai dengan Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan.

Dewasa ini sering sekali Desa melakukan kecurangan atau penyelewengan Dana Desa yang seharusnya untuk membangun Desanya sendiri akan tetapi dalam kenyataanya berbanding terbalik. Dalam hal ini penulis menggunakan teori Dunn (1981), dalam hal ini penulis ingin melihat indikator keberhasilan dalam monitoring pengelolaan Dana Desa. Dalam hal ini terdapat indikator keberhasilan untuk melakukan monitoring yaitu Ketaatan (compliance), Pemeriksaan (auditing), Laporan (accounting), Penjelasan.

### Kerangka Berpikir Teoritis



## **1.8 Oprasional Konsep**

Definisi operasional menurut Sugiyono (2009) yaitu sebuah penentu bagi sifat atau kontrak yang nantinya harus dipelajari sehingga akan menjadi sebuah variabel terukur. Operasionalisasi konsep adalah tindakan memecah konsep penelitian menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola yang dapat diukur dan dipahami. Untuk menemukan definisi operasional untuk setiap topik penelitian, yang memerlukan pemecahan konsep menjadi bagian yang lebih spesifik.

### **1.8.1 Monitoring Pengelolaan Dana Desa**

Monitoring pengelolaan dana desa suatu aktivitas pimpinan memantau bagaimana dana desa dikelola untuk menilai seberapa baik organisasi berfungsi, menentukan apakah tujuannya telah tercapai, dan mengidentifikasi elemen apa saja yang dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan program.

Dalam oprasional konsep sendiri peneliti mengaju pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

Dalam menerapkan proses monitoring ini peneliti menggunakan teori Dunn (1981), Monitoring mempunyai empat Indikator, yaitu:

1. Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah perilaku administrasi, staf, dan semua orang yang terlibat mematuhi peraturan dan regulasi. Adapun indikator dalam ketaatan sendiri meliputi:
  - a) Ketaatan peraturan
  - b) Ketaatan pedoman layanan

2. Pemeriksaan (auditing). Monitoring memastikan apakah sumber daya dan layanan yang ditujukan untuk individu atau kelompok (target) tertentu telah disampaikan kepada mereka. Adapun indikator dalam pemeriksaan meliputi:
  - a) Ketersediaan sumber daya
  - b) Keakuratan temuan audit
3. Laporan (accounting). Setelah waktu yang telah ditentukan, monitoring menghasilkan data yang digunakan untuk “menghitung” dampak perubahan sosial dan pembangunan masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan. Laporan dikatakan berhasil apabila sudah memenuhi indikator:
  - a) Persiapan laporan
  - b) Penyusunan laporan
  - c) Pengawasan laporan
4. Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan data yang membantu menjelaskan dampak kebijakan dan ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi. Adapun indikator dari penjelasan adalah:
  - a) Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana
  - b) Kejelasan informasi hasil monitoring

### **1.8.2 Kendala Monitoring**

Kendala monitoring adalah halangan atau rintangan yang membatasi suatu keadaan untuk mencapai sasaran atau target monitoring mulai dari perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintah pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan desa.

Kendala monitoring pemerintahan desa pada umumnya disebutkan oleh Wasistiono dan Tahir (2006:96) yaitu:

- 1) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa. Adapun indikator dari belum sempurnanya kebijakan ialah
  - a) Adanya ketersediaan suprastruktur kebijakan
  - b) Infratrstruktur kebijakan
- 2) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah yang sangat terbatas sehingga mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan serta berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan. Adapun indikator dari sarana dan prasarana penunjang oprasional ialah
  - a) Dibangunnya infrastruktur pembangunan
  - b) Hambatan pembangunan
- 3) Kendala lain. Kendala lainnya ialah kendala yang tidak termasuk dari poin diatas yang sifatnya spontan sehingga bisa terjadi sewaktu waktu.
  - a) Hambatan tidak terduga



## **1.9 Argumen Penelitian**

Penggunaan dana desa didasarkan pada asas: keadilan, yaitu mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa diskriminasi; kebutuhan prioritas, yaitu mengutamakan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih diperlukan, dan berkaitan erat dengan kepentingan mayoritas masyarakat desa; dan tipologi desa, yang mempertimbangkan kondisi dan realitas khas desa secara geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologis. Mengetahui apakah penggunaan dana desa telah mengarah pada pengelolaan dana desa yang terorganisir, transparan, akuntabel, dan berkualitas sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi pedoman dalam pemilihan topik kajian ini. Kemampuan desa secara internal dalam mengelola Dana Desa masih diragukan karena desa yang melakukan pembangunan hanya menerima bantuan keuangan yang terbatas, jangka waktu penerimaan masih stagnan, dan pengelolaannya masih sangat terpusat oleh unit-unit lembaga pemerintah. Namun, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Disisi lain, dengan pengelolaan Dana Desa yang berdasarkan prinsip Monitoring Pengelolaan Dana Desa setidaknya memberikan harapan mayoritas yang menginginkan selesainya fasilitas umum desa, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya yang dibutuhkan lingkungan sekitar sesuai dengan rencana semula.

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Tipe Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi penelitian yaitu Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Maka pada Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Sugiyono (2010: 9) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penyelidikan di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan data induktif digabungkan dan dianalisis. Selain itu,

menurut Sugiyono (2017:147) pengertian deskriptif adalah proses menafsirkan data dengan meringkas atau menjelaskan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya, tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas.

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu gambaran deskriptif mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo apakah telah menerapkan prinsip Monitoring, Peneliti selanjutnya menerapkan strategi kualitatif dengan menguraikan informasi yang telah mereka peroleh dari studi mereka. Dan ini dimaksudkan agar dengan menggunakan strategi ini peneliti dapat memperoleh data secara utuh sehingga dapat dinyatakan dengan jelas dan hasilnya benar-benar sesuai dengan keadaan lapangan yang sebenarnya.

#### **1.10.2 Situs Penelitian**

Pemilihan lokasi dalam suatu penelitian tentu harus memenuhi beberapa syarat syarat. Pertama, yaitu sesuai lokasi dengan substansi penelitian, hal tersebut berguna lokasi dapat mensuplai isi masalah penelitian yang diteliti, yang membuatnya berharga terutama karena lokasi tersebut sesuai dengan substansi masalah penelitian. Kedua, peneliti harus dapat memberikan akses karena mereka dapat mengumpulkan informasi yang cukup tentang isu-isu, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, di lokasi studi. Terakhir, Anda harus bisa mentolerir kehadiran peneliti yang berkepanjangan. Adapun lokus penelitian ini adalah di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Sedangkan situs lokasi dari penelitian ini adalah kelurahan Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Situs penelitian yaitu tempat dimana seharusnya penelitian menangkap objek dari yang diteliti. Situs dari penelitian ini adalah para pemerintah Desa beserta perangkatnya dan masyarakat di Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

### **1.10.3 Subjek Penelitian**

Tatang M. Amirin, subjek penelitian, adalah sumber mendapatkan informasi diperoleh untuk penelitian, atau lebih tepatnya, seseorang atau sesuatu yang harus dikumpulkan datanya. Menurut Muhammad Idrus, subjek penelitian adalah orang, benda, atau makhluk hidup yang digunakan sebagai sumber data untuk proses pengumpulan data. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian adalah benda, orang, atau objek yang menjadi tempat pengumpulan data dan yang terkait dengan variabel penelitian. Ketiga definisi tersebut di atas menunjukkan keterkaitan yang kuat antara topik kajian dan lokasi sumber data.

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi (Pasolong, 2020: 107). Topik penelitian akan menjadi sesuatu yang mendasar dari masalah yang harus diselidiki dan berfungsi sebagai sumber pengumpulan data. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Desa Kesesirejo
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kesesirejo
3. Camat Kecamatan Bodeh
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Pematang
5. Tokoh masyarakat

### **1.10.4 Jenis Data**

Proses yang digunakan untuk melakukan penelitian dikenal dengan metode penelitian (Hasan, 2002: 21). Pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian, seperti wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi, merupakan cara lain untuk memahami teknik penelitian (Arikunto, 2002: 136).

Subagyo (2006: 2) menegaskan bahwa metodologi penelitian adalah sarana untuk mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sulistyono-Basuki (2010:78), tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang suatu subjek dari sudut pandang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada pemikiran, persepsi, pandangan, atau keyakinan subjek, yang semuanya tidak berwujud dan tidak dapat diukur.

Sebaliknya, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada analisis induktif daripada analisis deduktif, menurut Prastowo (2012: 45). Abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah diperoleh dan disatukan oleh metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cermat, bukan mendukung atau membantah hipotesis yang telah dikembangkan sebelum proses penelitian dimulai. Dalam penelitian ini, konsep ditetapkan, fakta dikumpulkan, tetapi tidak ada hipotesis yang diuji secara numerik. Monitoring Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya) diuraikan dalam penelitian ini dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

### **1.10.5 Sumber Data**

Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok kajian. Oleh karena itu, jenis data berikut digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan pendekatan penelitian deskriptif.:

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu dokumen asli, atau sumber lain dari pelaku dianggap sebagai data primer. sumber informasi penelitian diambil dari rincian yang langsung diperoleh dari sumber informasi yang diteliti. Kepala desa, sekretaris desa, dan warga sekitar terlibat aktif sebagai sumber data utama penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan setelah fakta atau dari sumber yang sudah ada saat penelitian dilakukan. Data sekunder yang dikutip dalam penelitian ini dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk internet, buku, jurnal, dan dokumen terkait penelitian. Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **1.10.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Louis Gottschalk (1986: 38), dokumen didefinisikan sebagai sumber informasi sejarah tertulis sebagai lawan dari artefak, kesaksian lisan, peninggalan tertulis, dan sisa-sisa arkeologi. Konsep ini sering dipahami dalam dua cara. atau untuk surat-surat formal, seperti dari negara bagian yang memuat surat perjanjian, undang-undang, hibah, dan lain-lain. Sumber data dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, peraturan, kebijakan, buku, surat kabar, transkrip, website, karya-karya monumental seseorang, prasasti, agenda dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan yang diteliti. Dengan melihat dan mengkaji dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain mengenai subjek tersebut, maka studi dokumentasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif.

Menurut Moleong (2001: 103), peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci atau alat penelitian utama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini. Ini berarti bahwa tidak mungkin bagi peneliti untuk memahami pentingnya isu-isu terkini dengan menggunakan nilai-nilai yang termasuk dalam objek studi atau teknik pengumpulan data lainnya. Karena seorang peneliti adalah alat yang sangat penting karena penelitian pada awalnya tidak memiliki bentuk yang pasti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti sekaligus berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Penyelesaian data untuk penelitian didukung dengan penggunaan alat

tambahan. Arikunto (2006) menjelaskan instrumen sebagai alat atau sarana yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, temuannya lebih baik, sehingga datanya mudah ditangani, sejalan dengan pendapat Moleong. Dua instrumen akan digunakan dalam perancangan metodologi pengumpulan data untuk gagasan kajian, yaitu:

### **1. Observasi**

Ulaftin (2014) menggambarkan observasi dalam sebuah penelitian sebagai pemusatan perhatian pada suatu objek sambil menggunakan kelima indera untuk mengumpulkan data. Pengamatan langsung melibatkan penggunaan indera penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan, dan, jika perlu, rasa. Pengamatan dapat menggunakan tes, angket, rekaman gambar, rekaman suara, kaidah observasi, dan alat bantu lainnya. Dalam penelitian kualitatif, alat observasi digunakan untuk melengkapi wawancara yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, observasi digunakan untuk melihat dan mengamati secara dekat objek penelitian agar peneliti dapat mendokumentasikan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengungkap hakikat penelitian yang dilakukan.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu jenis percakapan yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dari responden. Panduan wawancara atau interview guide adalah nama alatnya. Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur atau tidak terstruktur (bebas) dalam kehidupan nyata. Bebas mengacu pada kebebasan pewawancara untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber tanpa membawa pedoman wawancara. Persyaratan untuk situasi seperti ini adalah pewawancara mengingat informasi yang perlu dikumpulkan. Berbeda dengan wawancara terpandu, seperangkat pertanyaan komprehensif bergaya kuesioner berfungsi sebagai panduan pewawancara. Selain itu, ada wawancara terbimbing, di mana pewawancara bebas melakukan wawancara hanya dengan menggunakan petunjuk, yang hanya berisi garis besar. Rachmawati (2007) melanjutkan dengan menjelaskan bahwa peneliti harus memilih bagaimana struktur wawancaranya; struktur wawancara mungkin berkisar dari tidak terstruktur hingga terstruktur. Namun, wawancara tidak terstruktur atau semi terstruktur sering digunakan dalam penelitian kualitatif.



### **3. Dokumentasi**

Dokumen adalah tulisan, gambar, atau karya kolosal yang dibuat oleh seseorang yang berfungsi sebagai catatan peristiwa masa lalu (Sugiyono, 2018: 240). dokumen tertulis, seperti jurnal, sejarah hidup, biografi, aturan, dan kebijakan. dokumen yang berbentuk visual, seperti sketsa, gambar hidup, dan foto. Dalam penelitian kualitatif, dokumen merupakan pelengkap penggunaan teknik observasi dan wawancara (Sugiyono, 2015: 326).

#### **1.10.7 Analisis Dan Interpretasi Data**

Menurut L. R. Gay, meringkas temuan dari analisis penelitian kualitatif membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab. Sebelum terjun ke lapangan, analisis data dilakukan dalam penelitian kualitatif. Untuk alasan ini, analisis tersebut diselesaikan selama penelitian lapangan peneliti dan hingga publikasi temuan penelitian. Analisis data ini mungkin dimulai segera setelah peneliti memilih pertanyaan penelitian utama atau bahkan setelah laporan penelitian selesai. Akibatnya, teknik analisis data digunakan selama proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Analisis data melibatkan pencarian dan pengumpulan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat dibagikan kepada orang lain. Pengorganisasian data, deskripsi unit, sintesa, penyusunan pola, pemilihan mana yang signifikan dan mana yang akan diteliti, serta penarikan temuan yang mungkin dapat dikomunikasikan kepada orang lain merupakan langkah awal analisis data (Sugiyono, 2007: 224).

Tiga aliran operasi, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi dikatakan terjadi secara bersamaan ketika melakukan analisis data, menurut Miles & Huberman (1992: 16). Informasi lebih lanjut tentang tiga baris adalah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data disebut sebagai proses seleksi yang berkonsentrasi pada perampangan, abstraksi, dan mengubah data yang tidak diproses yang dihasilkan dari catatan tertulis terkait pekerjaan lapangan. Inisiatif ini difokuskan pada penelitian kualitatif dan terus mengurangi data. Ketika peneliti memilih (kadang-kadang tanpa menyadarinya sepenuhnya) kerangka konseptual dari bidang penelitian, tantangan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang akan diambil, jelas bahwa reduksi data diantisipasi. Proses pengurangan tambahan (membuat ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, pengelompokan, membagi, dan membuat memo) berlanjut saat pengumpulan data sedang berlangsung. Setelah melakukan penelitian lapangan, pengolahan atau reduksi data ini berlanjut hingga terciptanya laporan akhir yang komprehensif.

Analisis meliputi reduksi data. Untuk memperoleh dan memverifikasi kesimpulan akhir, data harus dipertajam, diklasifikasikan, diarahkan, dibuang, dan diatur melalui proses reduksi data. Peneliti tidak harus menafsirkan reduksi data sebagai kuantifikasi. Ada banyak metode untuk memadatkan dan mengubah data kualitatif, termasuk seleksi ketat, ringkasan atau deskripsi singkat, mengelompokkannya menurut pola yang lebih besar, dan banyak lagi. Data terkadang juga dapat diubah menjadi angka atau peringkat, tetapi ini tidak selalu merupakan ide yang bagus.

### **2. Penyajian Data**

Menurut Miles dan Huberman, sebuah presentasi hanya dapat terdiri dari sekumpulan fakta terorganisir yang darinya keputusan dapat dibuat. Mereka berpendapat bahwa representasi yang lebih baik, seperti berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan, merupakan komponen penting dari studi kualitatif yang baik. Semuanya diatur untuk memadukan informasi terorganisir dengan cara yang koheren dan mudah diperoleh. Hal ini memungkinkan analisis untuk memahami apa yang terjadi dan memutuskan apakah akan mencapai kesimpulan yang benar atau melanjutkan analisis sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh presentasi sebagai sesuatu yang dapat membantu.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan Kesimpulan Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu aktivitas dari keseluruhan konfigurasi. Sepanjang penelitian, kesimpulan juga dikonfirmasi. Verifikasi bisa secepat pemikiran ulang mental penganalisa (peneliti) saat dia menulis, tinjauan catatan lapangan, atau bisa menyeluruh dan memakan waktu seperti tinjauan sejawat dan brainstorming untuk menciptakan kesepakatan intersubjektif, serta upaya ekstensif untuk menyisipkan salinan temuan di kumpulan data lain. Dengan kata lain, validitas makna yang muncul dari data lain harus diperiksa kebenarannya, kekokohannya, dan penerapannya. Kesimpulan akhir tidak hanya dicapai selama fase pengumpulan data; itu juga membutuhkan verifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

#### **1.10.8 Kualitas Data**

Iskandar (2010: 68) menegaskan bahwa kaliber data yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kaliber data penelitian pada hipotesis yang diberikan. Alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data dan menyediakan data yang andal dapat digunakan untuk menilai kualitas studi. Uji validitas digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kualitas data.

### **1. Uji Validitas**

Validitas dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan seberapa jauh alat ukur yang digunakan terhadap sasaran atau seberapa jauh alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Semakin akurat alat uji tersebut tepat sasaran, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diuji, maka semakin tinggi validitasnya. Jika suatu alat ukur telah berhasil mengukur apa yang hendak diukur, maka dianggap memiliki validitas yang tinggi. Kelayakan atau kelayakan suatu alat ukur sebagai alat ukur yang diinginkan ditentukan oleh uji validitasnya. Untuk mengetahui apakah jawaban kuesioner dari responden benar-benar layak digunakan dalam penelitian ini, dilakukan uji validitas. Istilah validitas dalam penelitian kualitatif juga dapat disebut sebagai *trustworthiness*, *authenticity*, dan *credibility* dari Creswell (dalam Susanto, 2013). Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian bahwa hasil penelitian tersebut akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca pada umumnya. Uji validitas yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a.) Triangulasi**

Untuk memperkuat validitas data, proses triangulasi (Moleong, 2014) melibatkan membandingkan atau memverifikasi data dengan informasi dari sumber yang berbeda atau kriteria lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi sumber, membandingkan antara apa yang dikatakan informan dengan apa yang dikatakan subjek penelitian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan reliabilitas data karena dikumpulkan dari berbagai sumber, selain dari subjek penelitian saja, seperti teman dan tetangga.
2. Triangulasi metode, dibandingkan antara data hasil wawancara penelitian dan observasi penelitian. Penelitian kemudian dilanjutkan dengan membandingkan informasi dari pengamatan penelitian pada hasil wawancara dengan informasi yang dimuat dalam makalah terkait penelitian. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari wawancara.